



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN DATA TERPILAH BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI YANG RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian isu gender dalam bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender di bidang ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender.

mengingat...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 514);
8. Peraturan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN DATA TERPILAH BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI YANG RESPONSIF GENDER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat,
2. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur,
3. Analisis Gender adalah proses menganalisis data terpilah menurut jenis kelamin yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mengidentifikasi isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, khususnya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan,
4. Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di kementerian/lembaga untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.

Pasal 2...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Pasal 4

Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender bertujuan untuk:

1. memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) penyusunan data Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir;
2. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan
3. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender di kementerian/lembaga.

Pasal 5...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

1. Kementerian/lembaga melakukan Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender;
2. Dalam melakukan Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah;
3. Forum/kelompok kerja data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas antara lain:
 - a. mengkoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit kepegawaian/SDM, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender;
 - b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender;
 - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit kepegawian/SDM, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam publikasi yang diperbaharui secara rutin;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender kepada pimpinan kementerian/lembaga.

Pasal 6...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Pendanaan Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 221

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

Margareth Robin K.
NIP. 197103231997122001



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN DATA
TERPILAH BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI YANG
RESPONSIF GENDER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2010-2014, (Bappenas, 2009) salah satu bidang pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan tinggi prioritasnya adalah bidang ekonomi. Paling sedikit ada tiga kondisi pokok perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu (1) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan, (2) sistem pembinaan yang menciptakan sektor-sektor ekonomi yang kokoh, serta (3) sistem distribusi nilai tambah ekonomi yang *inclusive* dan berkeadilan, yang diharapkan akan memberi kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.

Sektor-sektor ekonomi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pembinaannya, antara lain adalah perindustrian, perdagangan, keuangan, pertanian, transportasi, dan pariwisata, serta sasaran lintas-sektor yang perlu mendapat perhatian besar adalah koperasi, usaha kecil, dan menengah. Bila dirinci menurut sektor lapangan kerja (versi *International Standard Industrial Classification* atau *ISIC*), di Indonesia, sektor industri dan perdagangan merupakan sektor yang amat penting. Kedua sektor ini merupakan tempat mencari nafkah bagi banyak anggota kelompok masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, yaitu kelompok yang jumlahnya besar, apabila kesejahteraannya dapat ditingkatkan, maka akan besar pula dampaknya pada perimbangan distribusi pendapatan.

Bila...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bila dilihat dari sisi jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, kedua sektor tersebut mempekerjakan sekitar sepertiga dari seluruh tenaga kerja. Dari seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang bekerja adalah sebanyak 114,02 juta orang; sektor industri (industri pengolahan) menyerap 14,78 juta orang atau sekitar 13 persen dan sektor perdagangan (termasuk restoran dan hotel) menampung 24,81 juta orang atau hampir 22 persen (BPS, 2013).

Dari sisi jenis kelamin pekerja, komposisi pekerja di sektor perdagangan dan industri polanya terbalik di kisaran 50:50. Pekerja sektor industri terdiri dari sekitar 58 persen pekerja laki-laki dan 42 persen pekerja perempuan, sementara sektor perdagangan lebih memberi kesempatan kerja kepada perempuan, yaitu sebesar 51 persen, daripada laki-laki, yang hanya 49 persen.

Pentingnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan pertama tahun 2013, tingkat pertumbuhan perekonomian nasional adalah sekitar 6,06 persen (BPS, 2013). Bila dirinci menurut sektor, maka hampir separuh dari pertumbuhan tersebut adalah andil kedua sektor tersebut, yaitu 23,59 persen dari sektor industri dan 14,11 persen dari sektor perdagangan.

Di dalam ISIC, usaha-usaha digolong-golongkan ke dalam sektor-sektor tanpa memandang besar kecilnya. Sebuah usaha industri pengolahan makanan yang omzetnya 900 milyar rupiah per tahun, misalnya, berada dalam sektor yang sama dengan usaha pengolahan tempe yang omzetnya hanya 50 juta setahun kendati ukuran usaha keduanya sangat berbeda. Jadi dalam ISIC usaha-usaha yang tergabung dalam kelompok KUKM (koperasi, usaha kecil dan menengah) tidak dikenal sebagai sebuah sektor yang utuh karena di sini tergabung usaha-usaha dari berbagai sektor. Di Indonesia KUKM merupakan objek pembinaan satu kementerian di luar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, hal ini dilaksanakan berdasarkan keyakinan bahwa membina usaha besar berbeda dengan membina usaha kecil. Pembinaan usaha kecil dan menengah dari sektor yang berbeda diasumsikan tidak banyak berbeda kendati baik masukan dan keluarannya berbeda.

Menurut...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Menurut BPS (2004) usaha mikro dan kecil umumnya adalah usaha non-pertanian, tidak berbadan hukum, yang tersebar di berbagai sektor ISIC. Terdapat lebih dari 17 ribu usaha mikro dan kecil yang bila digolongkan dalam klasifikasi industri versi ISIC, besar kontribusinya ke dalam sektor perindustrian dan perdagangan, yaitu 15,58 persen ke sektor industri pengolahan dan 61,16 persen ke sektor perdagangan inklusif restoran dan penyediaan akomodasi. Usaha mikro dan kecil ini menampung sekitar 31 juta pekerja, sebagian besar juga dipekerjakan oleh sektor industri (21,44%) dan perdagangan (58,26%).

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah dan jumlah pekerja yang terlibat di dalamnya, tumbuh dengan percepatan yang tidak sama. Menurut Kementerian KUKM (2014), jumlah usaha pada tahun 2012 ada sebanyak sekitar 56,535 juta unit, naik menjadi 57,901 juta unit atau tumbuh sebesar 2,42 persen pada periode 2013.

Dari fakta-fakta di atas jelas bahwa sektor perdagangan, sektor perindustrian, dan kelompok usaha KUKM besar peranannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila strategi dan arah pembangunan yang menyangkut ketiga kelompok tersebut berhasil baik, maka akan terjadi peningkatan ekspor, efisiensi industri dan penyerapan tenaga kerja yang semuanya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah dalam proses pembinaan usaha-usaha tersebut telah dipertimbangkan faktor keadilan terhadap semua kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan tersebut?. Apakah antar-daerah, antar-kelompok-sosial, antar jenis-kelamin dan antar-golongan lain tidak terdapat kesenjangan yang mencolok? Jawabnya akan diperoleh bila kondisi semua golongan yang merupakan sasaran dari kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan, dipilah menurut ciri-ciri di atas dan dianalisis. Penyebab kesenjanganpun, kalau ternyata ada, akan tergambar dalam prosedur-prosedur yang dianut untuk dijalankan.

Indonesia adalah negara yang besar, baik dilihat dari sisi luas wilayah, jumlah penduduk maupun keragaman budayanya. Karena sumber daya yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga bukan tak terbatas, tentu tidak semua wilayah dan kelompok masyarakat dapat sekaligus dijadikan sasaran program/kegiatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan cara untuk menentukan wilayah atau kelompok

penduduk...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

penduduk mana yang perlu dijadikan fokus, misalnya karena kelompok tertentu paling rentan dan perlu mendapat prioritas. Dalam rangka mengidentifikasi inilah diperlukan data tentang karakteristik individu-individu anggota masyarakat agar mereka dapat dipilah-pilah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing dapat dijadikan sasaran pembangunan.

Di berbagai bidang, kesenjangan kondisi sosial yang lebar antara berbagai kelompok, seperti antar-daerah, antar-budaya dan antar-jenis kelamin, sudah umum diketahui. Kesenjangan sosial yang kerap kali menjadi objek pembicaraan dan penelitian di antaranya adalah antara kelompok: desa-kota, antara laki-laki-perempuan, antar yang kaya-miskin, dan antara Indonesia bagian Barat-Timur. Di berbagai bidang masalah kesenjangan tersebut dapat diidentifikasi karena telah tersedia data tentang kondisi sosial yang dipilah menurut berbagai kelompok tersebut.

Data terpilah dapat berbentuk data kuantitatif dan kualitatif. Dengan membandingkan ringkasan data, terutama data kuantitatif, untuk berbagai kelompok masyarakat, maka akan dapat ditentukan pengelompokan berdasarkan suatu kategori, misalnya kerawanan, dipecah menjadi sangat rawan, rawan, kurang rawan, dan tidak rawan, atau pun kategori lainnya. Bila pemilahan data dilakukan lagi menurut ciri lainnya, informasi lengkap tentang siapa kelompok yang paling rawan, kerawanan seperti apa, di mana mereka tinggal, kapan kondisi tersebut terjadi, maka kelompok sasaran pembangunan akan dapat ditentukan. Kemudian rencana aksi akan dapat dirumuskan apabila keterangan untuk kelompok sasaran tersebut dilengkapi dengan informasi kualitatif tentang bagaimana dan mengapa kerawanan tersebut dapat terjadi.

Analisis akan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila tersedia data terpilah yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan relevan untuk semua permasalahan yang ingin dicari jawabannya. Dalam kaitan pengadaan data inilah buku kecil ini disusun sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengadaan data terpilah yang diperlukan untuk analisis, khususnya data terpilah menurut jenis kelamin, di lingkungan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian KUKM atau Kementerian di Lingkungan Perindagkop.

B. Tujuan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

B. Tujuan Penyusunan Buku Pedoman

Buku Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindagkop yang Responsif Gender merupakan suplemen dari buku Panduan Umum Penyusunan Data Terpilah yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan PA (2011). Buku ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan buku data terpilah menurut jenis kelamin dalam lingkup Perindagkop. Manfaat lain dari adanya pembakuan metodologi penghitungan yang disajikan dalam buku pedoman ini adalah dapat disusunnya perbandingan data terpilah menurut jenis kelamin antar-tahun, antar-wilayah, maupun antar-kelompok lainnya.

Data terpilah diharapkan akan membuka wawasan pembaca tentang ada atau tidaknya kesenjangan gender yang terjadi di lingkungan kementerian-kementerian ini. Dengan demikian para pembuat kebijakan akan lebih terbantu dalam mengidentifikasi kelompok sasaran pembangunan yang lebih tepat.

Data terpilah diharapkan dapat bermanfaat untuk menyusun analisis gender bidang Perindagkop agar dapat mendukung kegiatan Kementerian Perindagkop, antara lain, dalam penyusunan anggaran yang responsif gender (PPRG) yang ditunjukkan dalam *Gender Budget Statement (GBS)* dan reformulasi kebijakan agar menjadi responsif gender dengan menggunakan alat analisis, antara lain, *Gender Analysis Pathway (GAP)*.

Mengingat luasnya lingkup Kementerian Perindagkop, rujukan ini dirasa penting diadakan, agar setiap unit dapat menyusun data terpilah yang terkait dengan unitnya, tetapi baku dan konsisten dengan data serupa dari unit lain, sehingga data dari masing-masing unit dapat diperbandingkan dan diagregasikan. Dalam jangka panjang dokumen ini perlu dipantau dan ditinjau ulang untuk melihat apakah masih relevan dipakai atau sudah harus diperbaharui.

C. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Suatu instruksi dari Presiden RI ditujukan kepada kementerian/lembaga dan daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), untuk melaksanakan PUG dalam rangka mencapai kesetaraan gender melalui pengintegrasian aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki, harus dimasukkan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

2. Peraturan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Republik Indonesia No. 05 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak (KPP-PA, 2014). Dalam Permen ini, yang dimaksud dengan data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur di seluruh bidang pembangunan yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya serta kekerasan;
3. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 05/NKB/M.KUKM/IV/2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Rangka mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Pasal 4 Ayat 1 peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Kemudian dalam Pasal 5 Ayat 3 disinggung juga tentang penanganan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra, SKPD dan RKPD. Mengingat bahwa data terpilah merupakan prasyarat dapat dilakukannya analisis gender, maka pengadaan data terpilah di semua bidang pembangunan dimasukkan ke dalam agenda setiap instansi yang tinggi prioritasnya.

7. Surat...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

7. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SE No. 270/M.PPN/11/2012, NOMOR: SE-33/MK.02/2012, NOMOR: 050/4379A/SJ, NOMOR: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Surat edaran ini berisi antara lain, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Strategi Nasional PUG melalui PPRG untuk Kementerian/Lembaga, dan untuk Pemerintah Daerah.

BAB II...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB II
POKOK-POKOK PELEMBAGAAN

Pokok-pokok pelebagaan penyusunan data terpilah bidang PERINDAGKOP yang responsif gender terdiri dari komponen yang meliputi peraturan, lembaga, dan mekanisme.

A. Peraturan

Untuk dapat menyusun data terpilah secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan peraturan sebagai payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian bidang PERINDAGKOP. Keberadaan peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penyusunan data terpilah sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan menteri atau surat keputusan menteri dan kesepakatan bersama (*MoU*).

B. Lembaga

Penyusunan data terpilah agar dapat berjalan secara efektif diperlukan pengorganisasian yang jelas, mengacu pada tugas dan fungsi, serta tanggungjawab masing-masing, baik di internal maupun bersinergi dengan sektor/lembaga/unit lain. Untuk itu kementerian bidang PERINDAGKOP dapat membentuk/mengembangkan Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah.

Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah beranggotakan Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi, Unit Kepegawaian, Unit Penelitian, Unit Perencanaan, dan Unit Pelaporan. Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah merupakan wadah komunikasi antar anggota kelompok dan juga sebagai wadah berbagi pengalaman dan informasi, serta memudahkan akses terhadap data dan informasi.

Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah yang baik, harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham akan pentingnya data terpilah dalam proses pembangunan dan terampil dalam pengelolaan data terpilah, serta didukung ketersediaan sarana dan prasarana berupa teknologi informasi yang memadai untuk menyimpan dan menyebarkan data dan informasi.

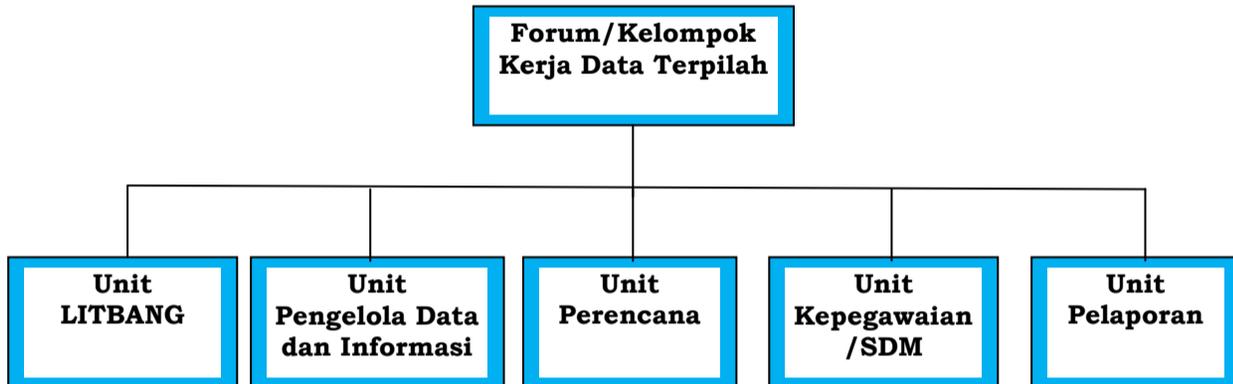
Gambar 1...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Gambar 1.
Struktur Penyusunan Data Terpilah Bidang PERINDAGKOP



C. Mekanisme

Untuk mempercepat terwujudnya persamaan pandangan tentang penyusunan data terpilah, serta memudahkan komunikasi, diperlukan mekanisme penyusunan data terpilah, antara lain: (1) indikator dan jenis data yang dibutuhkan; (2) pengumpul data; (3) metode pengumpulan dan alur data; dan (4) periode pengumpulan data.

D. Definisi Teknis

Mengingat bahwa telah banyak buku teks, buku pedoman, peraturan perundang-undangan yang memuat konsep dan definisi teknis yang baku tentang berbagai hal yang berkaitan dengan data dan gender, maka definisi teknis yang dipakai dalam buku pedoman ini mengacu pada definisi teknis yang telah dihimpun dalam Surbakti (2014).

a. Pengertian Gender dan Isu Gender

1. Akses dalam pembangunan adalah peluang laki-laki atau perempuan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan pelayanan seperti keuangan, modal, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).
2. Analisis gender adalah proses penelaahan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat masing-masing (KPP-PA, 2011). Analisis gender digunakan untuk menelaah kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, agar dapat diketahui peranserta laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing.

3. Bias...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

3. Bias gender adalah pandangan atau visi tentang gender yang berpihak pada jenis kelamin tertentu (KPP-PA, 2011).
4. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. (KPP-PA, 2011).
5. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender yang biasanya cenderung menguntungkan atau merugikan salah satu kelompok tersebut. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi objektif di lapangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan (KPP-PA, 2011).
6. Jenis kelamin adalah ciri biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi fisiknya. Perempuan mempunyai alat kelamin yang mendukung fungsi reproduksi, seperti hamil, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki hanya mempunyai alat kelamin tetapi tidak dapat hamil, melahirkan dan menyusui (Kamala Bahsin, 2000).
7. Keadilan gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan karena kebutuhannya yang berbeda (KPP-PA dan Unifem, 2010).
8. Kesenjangan gender adalah adanya perbedaan akses pada atau peluang untuk memperoleh sumber daya pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi, dan kontrol masing-masing pihak yang mengakibatkan perbedaan antara keduanya dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan tersebut (KPP-PA, 2010).
9. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (KPP-PA, 2010).

10. Manfaat...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

10. Kontrol dalam pembangunan adalah wewenang/kemampuan laki-laki atau perempuan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kegiatan pembangunan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).
11. Manfaat pembangunan adalah hasil pembangunan yang dirasakan laki-laki atau perempuan baik terutama secara langsung (KPP-PA, 2011) maupun tidak langsung (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).
12. Partisipasi dalam pembangunan adalah besarnya peran atau aktivitas laki-laki atau perempuan dalam suatu kegiatan pembangunan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).
13. Responsif gender adalah suatu kondisi tentang kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan secara konsisten dan sistematis perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan (KPP-PA, 2010).

b. Data Terpilah dan Data Gender

1. Data adalah kumpulan nilai variabel (datum) yang dinyatakan baik dalam bentuk angka (data kuantitatif), keterangan, dan gambar atau atribut (data kualitatif) (KPP-PA dan BPS, 2011).
2. Data dasar adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dan umumnya dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik).
3. Data gender adalah data yang mengacu pada hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan ((Permen PP-PA No. 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak).
4. Data pelaku adalah data yang menggambarkan keterlibatan laki-laki atau perempuan sebagai pelaku kegiatan pembangunan (KPP-PA dan Kementerian PU, 2011).
5. Data pemanfaat atau data penerima manfaat adalah data yang menggambarkan keterlibatan laki-laki atau perempuan sebagai sasaran atau pemanfaat kegiatan pembangunan (KPP-PA dan Kementarian PU, 2011).
6. Data sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor. Data ini umumnya dikumpulkan oleh instansi melalui catatan administrasinya (UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik).

7. Data...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

7. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan (Permen PP-PA NO 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak).
8. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).
9. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).
10. Indikator komposit adalah ukuran hasil penghitungan terhadap beberapa variabel untuk membandingkan beberapa objek yang diteliti (KPP-PA dan BPS, 2011).
11. Indikator kualitatif adalah ukuran hasil penghitungan dari data kualitatif untuk membandingkan beberapa kelompok objek berupa atribut, narasi atau pernyataan yang dapat juga diubah dalam bentuk skala (lihat data kualitatif).
12. Indikator kuantitatif adalah ukuran hasil penghitungan dari data kuantitatif untuk membandingkan beberapa kelompok objek berupa statistik seperti jumlah, rata-rata atau rerata, rasio, persentase, *rate*/angka dan indeks (lihat data kuantitatif).
13. Indikator tunggal adalah ukuran hasil penghitungan terhadap satu variabel untuk membandingkan beberapa objek yang diteliti (KPP-PA dan BPS, 2011).

Pemilahan tersebut biasanya dilakukan kalau ingin melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan di suatu bidang tertentu. Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakteristik tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan. Bila akan melakukan analisis gender, data perlu dipilah menurut jenis kelamin. Untuk melakukan analisis tentang kesenjangan kemiskinan, data perlu dipilah menurut status sosial-ekonominya. Bila ingin diketahui dampak pembangunan menurut wilayah atau analisis spasial, data perlu dipilah menurut wilayah. Begitu pula analisis dapat dilakukan berdasarkan umur atau waktu kejadian seperti analisis *cohort* dan analisis deret waktu atau analisis *time series*.

14. Statistik...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

14. Statistik/indikator/indeks adalah kelompok datum atau data yang diringkas dengan penghitungan menjadi satu dan merupakan ukuran untuk membandingkan dua kelompok penduduk atau objek yang diteliti; dalam pengertian umum statistik, indikator maupun indeks juga dikatakan sebagai data (KPP-PA dan BPS, 2011).
15. Bila data terpilah dapat menunjukkan ciri-ciri tentang status, peran, kondisi dan kebutuhan menurut jenis kelamin, maka akan terbuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Kumpulan data yang dapat menggambarkan status, peran, kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat disebut data gender. Dengan tersedianya data gender ini, maka akan dapat dilakukan suatu analisis gender.

E. Jenis Data Terpilah dan Sumbernya

Jenis data terpilah bidang PERINDAGKOP yang perlu disajikan didasarkan pada dua hal yang dirujuk dalam PUG, yaitu pertama, jenis data pelaku pembangunan menurut jenis kelamin. Informasi ini merupakan proksi indikator integrasi, yaitu intensitas diintegrasikannya aspirasi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan proses pembangunan. Rujukan yang kedua, jenis data pemanfaat pembangunan menurut jenis kelamin yang dapat menggambarkan berapa besar kelompok laki-laki atau perempuan dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

1. Data Partisipasi/Pelaku SDM dalam Pembangunan PERINDAGKOP

Paling tidak ada dua pertimbangan mengapa data partisipasi perempuan dan data partisipasi laki-laki perlu diketahui. Seperti telah disebutkan di atas, salah satu permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah masih rendahnya kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, sehingga aspirasinya kurang mendapat perhatian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu data mengenai kualitas perempuan yang terlibat dalam pembangunan PERINDAGKOP perlu diketahui. Pertimbangan selanjutnya adalah adanya asumsi bahwa besar kecilnya jumlah laki-laki atau perempuan yang ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, atau menjadi pelaku pembangunan, akan menentukan besar kecilnya pengintegrasian aspirasi dan kebutuhan laki-laki atau perempuan dalam proses manajemen PERINDAGKOP, itulah sebabnya mengapa data tentang pelaku pembangunan PERINDAGKOP ini perlu diidentifikasi. Dengan demikian data partisipasi SDM dalam pembangunan PERINDAGKOP perlu mencakup keterangan tentang jumlah, kualitas dan peran SDM masing-masing kementerian di lingkungan PERINDAGKOP.

2. Data...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

2. Data SDM Umum

Selain dipilah menurut jenis kelamin, data SDM umum perlu dipilah juga menurut ciri lain seperti eselon, golongan kepangkatan, struktural/fungsional, dan pendidikan. Dengan melihat ciri-ciri tersebut akan dapat diperkirakan seberapa besar partisipasi SDM laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Data keterlibatan SDM laki-laki dan perempuan di kementerian dalam pembangunan PERINDAGKOP secara umum dapat diperoleh dari Biro Kepegawaian di tiap Satuan Kerja setingkat Eselon I.

3. Data SDM Khusus

Ada kalanya tugas dan fungsi SDM sangat spesifik, baik laki-laki maupun perempuan. Informasi ini terkadang tidak secara lengkap tercatat di Satuan Kerja Kepegawaian, padahal informasi ini sangat penting untuk menunjukkan kualitas dan peran SDM dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, informasi ini perlu digali dari satuan kerja utama di kementerian. Sebagai contoh, untuk kegiatan khusus yang berkaitan dengan hal-hal seperti pelatihan, pemantauan, evaluasi dan penelitian, data pelaku pembangunan ini penting untuk diidentifikasi secara tersendiri dan dirinci menurut jenis kelamin. Data keterlibatan SDM dalam kegiatan khusus kementerian, seperti SDM yang mengajar, yang melakukan pemantauan kegiatan tertentu, atau yang menjadi penanggung jawab penelitian dapat diperoleh dari satuan kerja yang terkait.

4. Data Pemanfaat Hasil Pembangunan PERINDAGKOP

Kondisi, tugas dan fungsi ketiga kementerian di lingkungan PERINDAGKOP sangat bervariasi. Walaupun demikian program/kegiatan pembangunan yang keluaran/*output*-nya dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan umumnya tidak terlalu berbeda satu sama lain. Kegiatan pembangunan di kementerian umumnya mencakup beberapa jenis seperti diuraikan berikut:

- a. Pengaturan: indikator kinerjanya antara lain berupa jumlah dokumen pengaturan yang diselesaikan;
- b. Peningkatan kualitas pegawai: indikator kinerjanya berupa jumlah pegawai yang telah dikirim ke pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelayanan, pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat: indikator kinerjanya adalah jumlah anggota masyarakat yang dilayani sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan jumlah anggota masyarakat yang diberdayakan melalui penyuluhan atau sosialisasi;

d. Koordinasi...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- d. Koordinasi: indikator kinerjanya adalah antara lain jumlah diselenggarakannya rapat koordinasi dengan staf dari satuan kerja *internal/external* maupun masyarakat;
- e. Pembangunan sarana/prasarana: indikator kinerjanya adalah antara lain, kuantitas dan kualitas bangunan fisik yang dibangun, dan
- f. Pengawasan: indikator kinerjanya adalah, antara lain, jumlah dokumen pengawasan yang dibuat.

Untuk menilai apakah hasil pembangunan dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan secara seimbang, maka harus dilihat apakah keluaran pembangunan responsif gender atau tidak. Dari sisi lain pemanfaat hasil pembangunan dapat juga dilihat dari informasi tentang siapa saja yang menjadi kelompok sasaran program pembangunan PERINDAGKOP apakah laki-laki atau perempuan dan berapa jumlahnya. Data tentang pemanfaat ini umumnya dapat diperoleh dari satuan kerja teknis kecuali data yang berbentuk bangunan fisik.

Dalam dokumen perencanaan, seperti RPJM,, Renstra, Renja, dan RKAK/L, biasanya indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program sudah ditentukan. Dalam beberapa dokumen perencanaan, besarnya target kuantitatif yang ingin dicapai juga dicantumkan. Namun demikian, biasanya tidak dipilah menurut laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu indikator kinerja tersebut perlu 'diterjemahkan' ke dalam data terpilah kualitatif atau kuantitatif, seperti yang akan diutarakan berikut:

F. Pengaturan

Hasil dari kegiatan pengaturan biasanya berbentuk dokumen dan peraturan: Dokumen pengaturan dapat berupa pengaturan dari sisi teknis dan pengaturan terhadap manusia atau kelompok masyarakat. Contoh pengaturan teknis adalah, seperti pengaturan membangun gedung, pendirian suatu usaha, dan isi dokumennya adalah netral gender sehingga belum perlu disajikan terpilah, sebaliknya dokumen pengaturan yang objeknya manusia atau kelompok masyarakat perlu dianalisis apakah responsif gender atau tidak. Analisis dapat dilakukan dengan metode analisis isi (dokumen atau aturan) dengan Parameter Kesetaraan Gender/lensa gender atau audit gender. Walaupun suatu satuan kerja mempunyai *output* kegiatan berupa dokumen dan aturan yang dibuat, tetapi data tentang dokumen dan aturan mana yang responsif gender perlu diseleksi oleh tim yang dibentuk khusus untuk itu.

G. Peningkatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

G. Peningkatan Kualitas Pegawai

Kegiatan peningkatan kualitas manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, peningkatan kualitas SDM kementerian melalui pendidikan formal atau pelatihan, antara lain, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, sementara itu yang kedua, adalah kegiatan pelatihan yang dapat diangkat sebagai contoh, pelatihan penjejaran, pelatihan teknis, dan pelatihan administrasi. Kegiatan yang lain seperti sosialisasi dan penyuluhan pegawai serta kursus-kursus bahasa dan lainnya, kalau ada, perlu dicakup. Satuan kerja yang memegang dokumen mengenai hal ini adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan di kementerian.

H. Koordinasi

Suatu lembaga atau satuan kerja seringkali mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator. Kegiatan pembangunan yang bersifat koordinatif, misalnya kegiatan satuan kerja perencanaan serta pusat pendidikan dan pelatihan. Hasilnya dapat berupa dokumen koordinasi dan dokumen peserta rapat koordinasi.

I. Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang memberi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya penyuluhan dan sosialisasi kepada kelompok masyarakat tertentu. Menyusun serta menyajikan data tentang peningkatan kualitas manusia ini tidaklah sulit selama data yang berkaitan dengan kegiatan bersama kelompok sasaran selalu dicatat dan dirinci menurut jenis kelamin. Satuan kerja teknis yang mempunyai kegiatan ini bertanggung jawab untuk menyediakan datanya.

J. Pembangunan fisik

Bila dilihat dari fasilitas yang tersedia di dalamnya, suatu bangunan fisik dapat dinilai responsif gender atau tidak. Fasilitas yang pertama kali perlu dicek adalah tersedianya ruang ASI (*nursery room*) di mana ibu-ibu yang sedang menyusui dapat memompa dan memberi ASI pada bayinya. Fasilitas berikutnya adalah tersedianya kamar mandi perempuan yang cukup air dan kebutuhan lainnya, seperti gantungan tas dan plastik pembungkus pembalut wanita (*sanitary napkin*). Fasilitas lainnya yang perlu dilihat adalah tangga: ukuran dan model tangga perlu mendapat perhatian juga. Data tentang hasil berupa bangunan fisik dapat diperoleh dari Sekretariat Jendral (Setjen).

K. Pengawasan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

K. Pengawasan

Dalam dokumen hasil pengawasan pembangunan perlu juga dinilai agar diketahui apakah hasil pengawasan tersebut responsif gender atau tidak. Dokumen hasil pengawasan disusun oleh staf di Inspektorat Jendral. Namun demikian, seperti halnya dengan dokumen pengaturan, suatu tim khusus perlu dibentuk untuk menilai apakah laporan hasil pengawasan responsif gender atau tidak.

L. Data Pendukung Pembangunan Perindagkop

Kelompok data lain yang perlu disajikan adalah jenis data yang banyak berpengaruh pada kebijakan yang diambil kementerian di lingkungan Perindagkop. antara lain, data tentang penduduk yang bekerja di sektor Perindagkop dilihat dari sisi, antara lain, status pekerjaan, jenis pekerjaan, umur, jam kerja dan upah. Dua jenis data yang dibutuhkan di sini dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang pertama adalah data yang dikumpulkan melalui pendekatan masyarakat dan yang kedua data yang dikumpulkan melalui pendekatan usaha. Data yang ada di BPS ini telah dirinci menurut jenis kelamin, sehingga untuk itu tidak perlu usaha yang khusus untuk mengolah sendiri.

M. Identifikasi Data tentang Manfaat Pembangunan yang Akan Dipilah Berbasis Dokumen RKP/Renstra/Renja Kementerian

Kementerian-kementerian di lingkungan Perindagkop melaksanakan kegiatan pembangunan melalui Satuan kerja utama atau direktorat jendral (Ditjen) baik di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, terdapat tiga satuan kerja pendukung, yaitu sekretariat jendral (Setjen), inspektorat jendral (Irjen) dan badan penelitian dan pengembangan Perindagkop di masing-masing kementerian.

Output/outcome pembangunan suatu kementerian/lembaga (K/L), termasuk Perindagkop, dapat dilihat pada dokumen perencanaan seperti RPJMN, Renstra, dan RKL. Sebagai contoh, akan disajikan identifikasi data yang dapat diangkat dari salah satu dokumen perencanaan, yaitu tentang indikator kinerja utama dan indikator kinerja jenis lainnya di lingkungan Kementerian Perindagkop.

Indikator...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Indikator kinerja utama (IKU) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis dalam lingkungan masing-masing satuan kerja setingkat Ditjen di masing-masing kementerian. Indikator ini biasanya disajikan di dalam suatu matriks bersama dengan kebijakan/program strategis yang ditentukan. Indikator kinerja ini dapat berupa indikator kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengetahui apakah hasil kinerja pembangunan ini (selanjutnya disebut sebagai IKU) dinikmati oleh kelompok laki-laki dan perempuan, maka indikator kinerja ini perlu dipilah lagi menurut jenis kelamin (dalam buku ini selanjutnya disebut dengan data terpilah).

Dalam upaya menyajikan data terpilah, K/L perlu memilih dokumen perencanaan yang lebih rinci, kalau bisa sampai ke tingkat sub-kegiatan, agar indikator yang disajikan sebagai data terpilah lebih mudah diidentifikasi. Bila manfaat pembangunan dari tahun ke tahun dapat dikumpulkan seperti ini, maka secara kumulatif kemajuan dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender dapat dipantau. Sebagai langkah awal, contoh tentang indikator kinerja Perindagkop pada Tabel 1 dapat dijadikan acuan.

Identifikasi data terpilah hasil kinerja pembangunan ini sangat penting dalam membuka wawasan para pembuat kebijakan terhadap adanya kesenjangan gender dari para pemanfaat hasil pembangunan. Bila kesenjangan gender ini dapat dianalisis (dengan analisis gender) dari mana sumbernya dan apa penyebabnya, maka intervensi untuk memperkecil kesenjangan dapat dilakukan.

Tabel 1: Contoh Indikator Kinerja Bidang Perindagkop

No	Kelompok Jenis Data	Indikator Kinerja	Data Terpilah
1,	Pengaturan industri	Konsep kebijakan dan produk hukum	Kualitatif: Produk hukum industri yang responsif gender atau tidak
2.	Pengaturan perdagangan	Perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara <i>on-line</i>	Kualitatif: Aturan responsif gender atau tidak
3.	Pengaturan KUKM	Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM	Kualitatif: Konsep model insentif yang responsif gender atau tidak

4. Peningkatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

4.	Peningkatan kualitas SDM Kementerian Perindustrian	Tersedianya SDM aparat pengawas di Kementerian Perindustrian yang telah mengikuti diklat	Kuantitatif: Jumlah dan % SDM Pengawas Lk/Pr di kementerian yang telah mengikuti diklat
5.	Peningkatan kualitas SDM Kementerian Perdagangan	Jumlah pelatihan SDM Kementerian Perdagangan di bidang ekspor	Jumlah SDM yang mendapat pelatihan ekspor menurut jenis kelamin
6.	Peningkatan kualitas SDM KUKM	Jumlah SDM KUKM yang mengikuti Diklat (Pusat dan Daerah)	Kuantitatif: Jumlah SDM Lk/Pr di KUKM yang mengikuti Diklat (Pusat dan Daerah)
7.	Koordinasi industri	Instruktur yang bersertifikat (hasil kegiatan koordinasi)	jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikat Lk/Pr dalam setiap bidang industri kementerian
8.	Koordinasi KUKM	Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan KUKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota	Kualitatif: Aturan koordinasi responsif gender atau tidak Kuantitatif: Jumlah peserta rapat koordinasi Lk/Pr
9.	Pelayanan Industri	Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan	Jumlah fasilitasi kepada perusahaan dengan pengelola Lk/Pr yang dilakukan setiap sektor untuk membantu industri mendapat akses dan bantuan lainnya ke sumber pembiayaan

10. Pelayanan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

10.	Pelayanan Perdagangan	Jumlah pelaku ekonomi yang mendapat fasilitas	Kuantitatif: Jumlah pelaku ekonomi yang mendapat fasilitas menurut jenis kelamin
11.	Pelayanan KUKM	Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada KUKM	Kuantitatif: Jumlah dan besarnya pinjaman yang disalurkan kepada KUKM yang dikelola oleh Lk/Pr
12.	Pengawasan Industri	Laporan evaluasi pelaksanaan	Kualitatif: hasil laporan evaluasi pelaksanaan tugas yang responsif gender
13.	Pengawasan KUKM	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah	Kualitatif: Hasil pengawasan yang responsif gender atau tidak

Sumber: IKU Kementerian di Lingkungan Perindagkop

N. Penyajian Data Terpilah

Penyajian data terpilah ini disarankan dalam tiga bentuk, yaitu dalam bentuk tabel, narasi dan gambar (Surbakti, 2014). Tidak semua pembaca mempunyai keahlian dalam membaca tabel, oleh karena itu pembaca perlu dipandu dalam memahami tabel dengan penjelasan narasi. Adanya isu gender penting yang ditemukan perlu ditonjolkan dalam tabel dengan menghitung besarnya kesenjangan gender, kemudian diperjelas dengan narasi maupun gambar.

Seperti telah dijelaskan di muka, kesenjangan gender adalah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan sebagai akibat dari adanya perbedaan akses pada atau peluang untuk memperoleh sumber daya pembangunan. Ada beberapa ukuran kesenjangan gender yang sederhana, antara lain: (a) perbedaan gender, (b) rasio gender atau rasio jenis kelamin, dan (c) indeks paritas gender, yang masing-masing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perbedaan Gender} = (\text{Nilai Persentase Laki-laki}) - (\text{Nilai Persentase Perempuan})$$

Catatan: Nilai persentase laki-laki + Nilai persentase perempuan = 100 persen
Rasio...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Rasio Gender atau Rasio Jenis Kelamin = (Nilai Persentase Laki-laki) / (Nilai Persentase Perempuan)

Catatan: Nilai persentase laki-laki + Nilai persentase perempuan = 100 persen

Indeks Paritas Gender = (Nilai Indikator Perempuan)/(Nilai Indikator Laki-laki)

Catatan: Nilai indikator laki-laki + Nilai indikator perempuan bisa tidak = 100

O. Tabel

Tabel data terpilah terdiri dari kumpulan sel menurut kolom atau baris yang dapat menampung data kelompok populasi menurut jenis kelamin—laki-laki dan perempuan. Kemudian masing-masing kolom atau baris tersebut dipilah lagi menurut karakteristik yang akan diteliti. Berkaitan dengan data pelaku pembangunan seperti yang dijelaskan sebelumnya, berikut adalah salah satu contoh tampilan tabel tentang SDM di Kementerian Perindustrian dirinci menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin.

Tabel 1.

Jumlah dan Presentase SDM menurut Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi menurut, Golongan dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

No	Golongan	Jumlah			Persentase (%)			Perbedaan Gender
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	
1.	Golongan IV	4	2	6	67	33	100	34%
2.	Golongan III	24	11	35	69	31	100	38%
3.	Golongan II	3	2	5	60	40	100	20%
4.	Golongan I	1	0	1	100	0	100	100%
	Jumlah	32	15	47	68	32	100	36%

Sumber: Biro Kepegawaian, KUKM, 2014

Tabel 2.

Jumlah dan Presentase SDM Itjen Kemenperin menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

No	Satuan Kerja	Jumlah			Persentase (%)			Perbedaan Gender
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	
1	Inspektorat I	13	2	15	86.67	13.33	100%	73.34%
2	Inspektorat II	11	3	14	78.57	21.43	100%	57.14%
3	Inspektorat III	7	8	15	46.67	53.33	100%	-6.66%
4	Inspektorat IV	10	5	15	66.67	33.33	100%	33.34%
5	Sekretariat Inspektorat Jenderal	25	24	49	51.02	48.98	100%	2.04%
	Inspektorat Jenderal	66	42	108	61.11	38.89	100%	22.22%

Sumber: Biro Kepegawaian, KUKM 2014

Upayakan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Upayakan penyajian suatu jenis data dalam satu tabel berasal dari sumber yang sama, seperti sensus, survey dan terutama data dari catatan administrasi pembangunan yang merujuk pada waktu yang sama. Hal ini dilakukan mengingat beberapa jenis data sangat dinamis yang dapat berubah setiap hari, seperti data SDM kementerian atau lembaga dan data kegiatan sosialisasi.

Berikan penjelasan apabila terpaksa harus menampilkan data yang dihimpun dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam tabel yang sama. Setelah semua tabel diperiksa konsistensinya, rancang penjelasan yang akan dibuat terhadap tabel-tabel dengan analisis sederhana dalam suatu narasi yang singkat.

P. Narasi

Sebelum tabel disajikan dalam bentuk narasi, maka ada hal-hal atau pesan penting yang perlu diperhatikan dari tabel. Salah satu model penyajian yang dapat dipakai adalah dengan menampilkan gambaran umum dan isu menonjol yang terlihat. Gambaran umum data dalam tabel dapat dilihat, misalnya tentang bagaimana pola komposisi/distribusi dari masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan antar-variabel dan antar-wilayah. Jelaskan apakah polanya sama, mirip/sejalan atau bertentangan. Setelah itu berikan perhatian khusus mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, dengan melihat indikator perbedaan gender, rasio jenis kelamin atau indeks paritas gender.

Gambaran pada Tabel 1 di atas hendaknya diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana, padat dan mudah dimengerti. Hindari penyajian atau penjelasan data dalam tabel seperti membaca angka-angka, satu per satu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Kemudian bila narasi akan diisi dengan analisis yang lebih komprehensif penjelasan perlu dilengkapi dengan informasi tentang apa yang menyebabkan adanya isu gender bukan asal berspekulasi tetapi dari pengetahuan yang digali dari berbagai sumber.

Q. Gambar...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

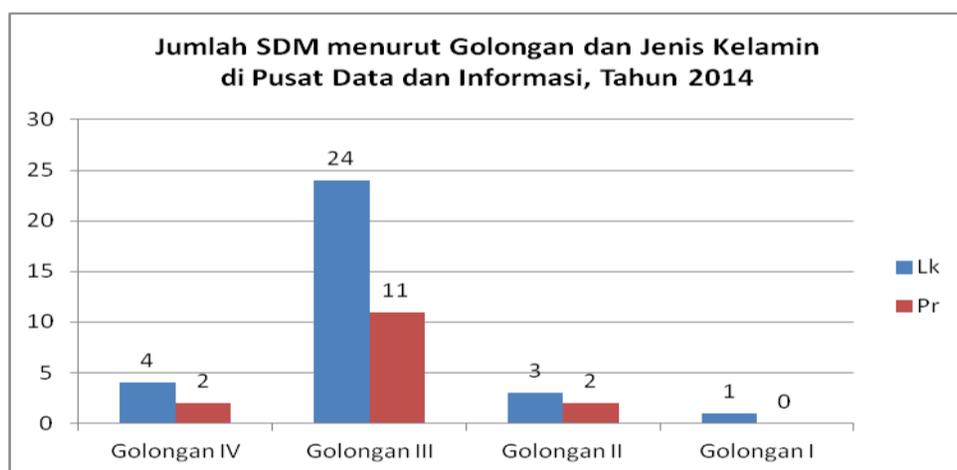
Q. Gambar

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan gambar adalah bahwa tidak semua data dalam tabel digambarkan. Pilih tabel-tabel yang menunjukkan ketimpangan gender yang tinggi untuk dibuat gambarnya. Penyajian data dalam bentuk gambar banyak ragamnya, baik dilihat dari pewarnaan maupun dari sisi bentuk gambar. Untuk memperjelas perbedaan atau ketimpangan gender, penggunaan gradasi warna biasa dilakukan, mulai dari warna muda untuk hal yang ingin dikategorikan ringan sampai warna tua untuk hal yang dikategorikan berat.

Bentuk gambar yang dapat dipilih, antara lain diagram garis, diagram batang, dan peta. Kecuali peta, banyak *software* yang sudah menjadi *public domain* yang bebas dipakai oleh siapa saja. Bila komposisi menurut jenis kelamin yang akan ditampilkan gambar yang dipilih biasanya berbentuk diagram bulat (*pie chart*) dan diagram batang bersambung untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, kalau perbedaan nilai indikator yang ingin ditonjolkan, maka diagram batang atau grafik garis dari ketimpangan atau masing-masing indikator kelompok laki-laki dan kelompok perempuan biasa dipakai.

Berikut adalah contoh gambar tentang kesenjangan gender yang dapat ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Contoh Gambar 1.



Sumber: KUKM 2014

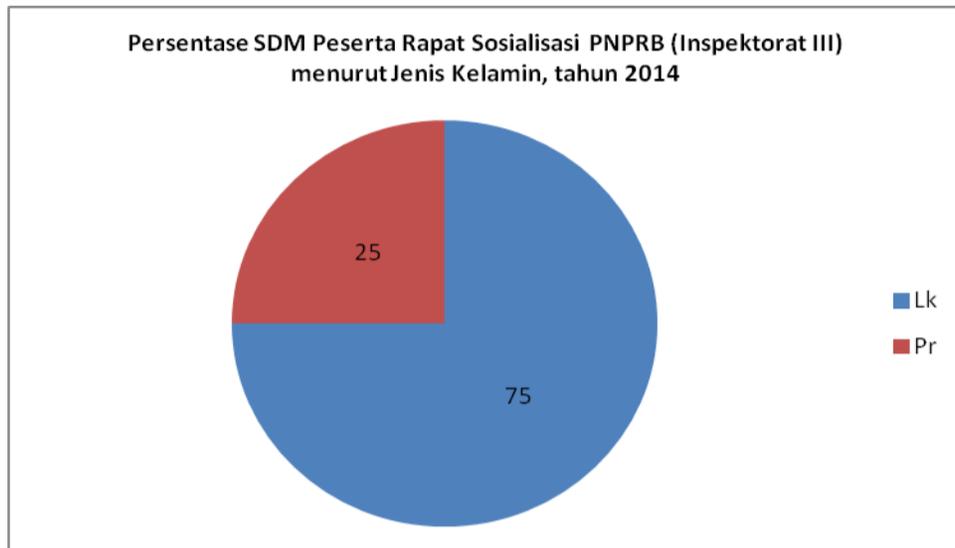
Contoh...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Contoh Gambar 2.



Sumber: KUKM 2014

R. Jenis Tabel yang Diusulkan untuk Disajikan oleh Masing-masing Kementerian

1. Pelaku Pembangunan per Satuan Kerja Setingkat Eselon I (SE1)
 - a. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat dan Jenis Kelamin, Tahun
 - b. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Status (struktural/fungsional) dan Jenis Kelamin, Tahun
 - c. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun
 - d. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jenis Kelamin, Tahun
 - e. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun
 - f. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun
 - g. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun

h. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- h. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Jenis Kajian/Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun
 - i. Jumlah dan Persentase SDM SE1 menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Jenis Kajian/Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun
 - j. Jumlah dan Persentase SDM SE1 yang Baru Diterima menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun,....., dan Pemanfaat Hasil Pembangunan
 - k. Pembangunan SDM per SE1 (Bidang: Peningkatan Kualitas SDM/Karyawan, Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi kepada Karyawan)
 - l. Jumlah dan Persentase SDM SE1 Penerima Tugas Belajar S1/S2/S3 di Dalam Negeri menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun....
 - m. Jumlah dan Persentase SDM SE1 Penerima Tugas Belajar S1/S2/S3 di Luar Negeri menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun....
 - n. Jumlah dan Persentase SDM SE1 Peserta Berbagai Jenis Diklat Teknis menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun....
 - o. Jumlah dan Persentase SDM SE1 Peserta Berbagai Jenis Diklat Administrasi menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun
 - p. Jumlah dan Persentase SDM SE1 Peserta Berbagai Jenis Diklat Penjenjangan Tk 1/2/3 menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun....
 - q. Jumlah dan Persentase SDM SE1 Peserta Kegiatan Koordinasi menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun
 - r. Jumlah dan Persentase SDM SE1 Peserta Sosialisasi menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun....
2. Pemberdayaan/Pelayanan Masyarakat
- a. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Peserta Kegiatan Sosialisasi Umum dari SE1 menurut Jenis Kelamin, Tahun....
 - b. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Peserta Diklat tentang Pertanahan dari SE1 menurut Jenis Kelamin, Tahun...
 - c. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- c. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Peserta Penyuluhan Teknis SE1 menurut Jenis Kelamin, Tahun...
- d. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Penerima Program Bantuan dari SE1 menurut Jenis Kelamin, Tahun ...
- e. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Penerima Pelayanan dari SE1 menurut Jenis Kelamin, Tahun ...
- f. Jumlah dan Persentase Calon Mahasiswa yang Mendaftar ke Akademi/Sekolah Tinggi Kedinasan (Kalau ada) menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Asal, Tahun....
- g. Jumlah dan Persentase Calon Mahasiswa yang Diterima ke Akademi/Sekolah Tinggi Kedinasan (Kalau ada) menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Asal, Tahun
- h. Jumlah dan Persentase Lulusan Akademi/Sekolah Tinggi Kedinasan (Kalau ada) menurut Jenis Kelamin dan Penempatan Kerja, Tahun

BAB III...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB III PENUTUP

Buku pedoman ini diharapkan dapat dipakai masing-masing kementerian di lingkungan Perindagkop di Pusat maupun instansi teknis sejenis di Daerah sehingga data di bidang Perindagkop dapat disusun secara terpilah menurut jenis kelamin, dengan demikian kesenjangan gender di bidang Perindagkop di pusat dan di daerah dapat dipantau serta direkapitulasi menjadi data terpilah. Data gabungan ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat membantu penentu kebijakan dalam melakukan perumusan kebijakan nasional di bidang Perindagkop.

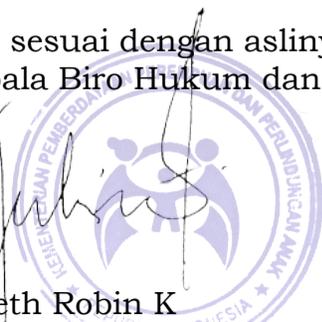
Kritik dan saran diharapkan dari pembaca demi peningkatan daya guna dari dokumen ini. Untuk ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,



Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001

Lampiran 1...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Lampiran 1.

Tabel I.A. Contoh *Dummy Tables* tentang Data Terpilah Pelaku Pembangunan (Umum) di Kementerian

Tabel I.A.1. Jumlah dan Persentase SDM di Kementerian menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 1(SE1) dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja SE 1	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Irjen						(100%)
2.	Setjen						(100%)
3.	Deputi A						(100%)
4.	Deputi B						(100%)
5.	Deputi C						(100%)
dst	Satuan Kerja SE 1 dst						(100%)
Jumlah							(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel I.A.2. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerianmenurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Direktorat	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						(100%)
2.	Satuan Kerja 2						(100%)
3.	Satuan Kerja 3						(100%)
4.	Satuan Kerja 4						(100%)
5.	Satuan Kerja 5						(100%)
dst	Satuan Kerja dst						(100%)
Jumlah							(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Tabel I.A.2.1. Jumlah dan Persentase SDM di di SE1 Kementerian.....
menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Status (struktural/fungsional)
dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Direktorat/Status	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Pejabat struktural						(100%)
	Pejabat fungsional tertentu						(100%)
	Pejabat fungsional umum						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
2.	Satuan Kerja 2						
	Pejabat struktural						(100%)
	Pejabat fungsional tertentu						(100%)
	Pejabat fungsional umum						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
3.	Satuan Kerja 3						
	Pejabat struktural						(100%)
	Pejabat fungsional tertentu						(100%)
	Pejabat fungsional umum						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
4.	Satuan Kerja 4						
	Pejabat struktural						(100%)
	Pejabat fungsional tertentu						(100%)
	Pejabat fungsional umum						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
dst	Satuan Kerja dst						
	Pejabat struktural						(100%)
	Pejabat fungsional tertentu						(100%)
	Pejabat fungsional umum						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
	Irjen/Setjen/Deputi						
	Pejabat struktural						(100%)
	Pejabat fungsional						(100%)
	Pejabat fungsional umum						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 36 -

Tabel I.A.2.2. Jumlah dan Persentase SDM di di SE1 Kementerian
menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Eselon dan
Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Direktorat /Eselon	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Eselon I						(100%)
	Eselon II						(100%)
	Eselon III						(100%)
	Eselon IV						(100%)
	Non-eselon						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
2.	Satuan Kerja 2						
	Eselon I						(100%)
	Eselon II						(100%)
	Eselon III						(100%)
	Eselon IV						(100%)
	Non-eselon						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
3.	Satuan Kerja 3						
	Eselon I						(100%)
	Eselon II						(100%)
	Eselon III						(100%)
	Eselon IV						(100%)
	Non-eselon						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
4.	Satuan Kerja 4						
	Eselon I						(100%)
	Eselon II						(100%)
	Eselon III						(100%)
	Eselon IV						(100%)
	Non-eselon						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
dst	Satuan Kerja dst						
	Eselon I						(100%)
	Eselon II						(100%)
	Eselon III						(100%)
	Eselon IV						(100%)
	Non-eselon						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
	Irjen/Setjen/Deputi						
	Eselon I						(100%)
	Eselon II						(100%)
	Eselon III						(100%)
	Eselon IV						(100%)
	Non-eselon						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Tabel I.A.2.3. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerianmenurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Direktorat/ Golongan	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Golongan IV						(100%)
	Golongan III						(100%)
	Golongan II						(100%)
	Golongan I						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
2.	Satuan Kerja 2						
	Golongan IV						(100%)
	Golongan III						(100%)
	Golongan II						(100%)
	Golongan I						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
3.	Satuan Kerja 3						
	Golongan IV						(100%)
	Golongan III						(100%)
	Golongan II						(100%)
	Golongan I						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
4.	Satuan Kerja 5						
	Golongan IV						(100%)
	Golongan III						(100%)
	Golongan II						(100%)
	Golongan I						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
dst	Satuan Kerja dst						
	Golongan IV						(100%)
	Golongan III						(100%)
	Golongan II						(100%)
	Golongan I						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
	Irjen/Setjen/Deputi						
	Golongan IV						(100%)
	Golongan III						(100%)
	Golongan II						(100%)
	Golongan I						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Tabel I.A.2.4. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerian menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Pendidikan	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	S3						(100%)
	S2						(100%)
	S1/D4						(100%)
	Diploma 1, 2, 3						(100%)
	SMK/SMU dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
2.	Satuan Kerja 2						
	S3						(100%)
	S2						(100%)
	S1						(100%)
	Diploma						(100%)
	SMK/SMU dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
3.	Satuan Kerja 3						
	S3						(100%)
	S2						(100%)
	S1						(100%)
	Diploma						(100%)
	SMK/SMU dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
4.	Satuan Kerja 4						
	S3						(100%)
	S2						(100%)
	S1						(100%)
	Diploma						(100%)
	SMK/SMU dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
dst	Satuan Kerja dst						
	S3						(100%)
	S2						(100%)
	S1						(100%)
	Diploma						(100%)
	SMK/SMU dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
	Irjen/Setjen/Deputi						
	S3						(100%)
	S2						(100%)
	S1						(100%)
	Diploma						(100%)
	SMK/SMU dan kurang						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

Tabel I.A.2.5. Jumlah dan Persentase di SE1 Kementerianmenurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Diklatpim yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun...

No.	Satuan Kerja Setingkat Direktorat/ Jenis Diklatpim	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Diklatpim Tk I						100%)
	Diklatpim Tk II						(100%)
	Diklatpim Tk III						(100%)
	Diklatpim Tk IV						(100%)
	Belum Diklat						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
2.	Satuan Kerja B						
	Diklatpim Tk I						(100%)
	Diklatpim Tk II						(100%)
	Diklatpim Tk III						(100%)
	Diklatpim Tk IV						(100%)
	Belum Diklat						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
3.	Satuan Kerja C						
	Diklatpim Tk I						(100%)
	Diklatpim Tk II						(100%)
	Diklatpim Tk III						(100%)
	Diklatpim Tk IV						(100%)
	Belum Diklat						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
4	Satuan Kerja D						
	Diklatpim Tk I						(100%)
	Diklatpim Tk II						(100%)
	Diklatpim Tk III						(100%)
	Diklatpim Tk IV						(100%)
	Belum Diklat						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
dst	Satuan Kerja dst						
	Diklatpim Tk I						(100%)
	Diklatpim Tk II						(100%)
	Diklatpim Tk III						(100%)
	Diklatpim Tk IV						(100%)
	Belum Diklat						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
	Irjen/Setjen/Deputi						
	Diklatpim Tk I						(100%)
	Diklatpim Tk II						(100%)
	Diklatpim Tk III						(100%)
	Diklatpim Tk IV						(100%)
	Belum Diklat						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

Tabel I.A.2.6. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerianmenurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Jumlah Pegawai Baru per Tahun dan Jenis Kelamin, Selama Tiga Tahun yang Lalu

No.	Satuan Kerja Setingkat Direktorat/ Status	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Tahun n						(100%)
	Tahun n-1						(100%)
	Tahun n-2						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
2.	Satuan Kerja B						
	Tahun n						(100%)
	Tahun n-1						(100%)
	Tahun n-2						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
3.	Satuan Kerja C						
	Tahun n						(100%)
	Tahun n-1						(100%)
	Tahun n-2						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
4.	Satuan Kerja D						
	Tahun n						(100%)
	Tahun n-1						(100%)
	Tahun n-2						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
dst	Satuan Kerja dst						
	Tahun n						(100%)
	Tahun n-1						(100%)
	Tahun n-2						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
	Irjen/Setjen/Deputi						
	Tahun n						(100%)
	Tahun n-1						(100%)
	Tahun n-2						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

Tabel I.A.2.7. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerian..... menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Jumlah Pegawai Baru per Tahun, Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Satuan Kerja Setingkat Direktorat/ Status	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Diploma IV, S1-S3						(100%)
	Diploma I, II, III						(100%)
	SLTA dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
2.	Satuan Kerja 2						
	Diploma IV, S1-S3						(100%)
	Diploma I, II, III						(100%)
	SLTA dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
3.	Satuan Kerja 3						
	Diploma IV, S1-S3						(100%)
	Diploma I, II, III						(100%)
	SLTA dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
4.	Satuan Kerja 4						
	Diploma IV, S1-S3						(100%)
	Diploma I, II, III						(100%)
	SLTA dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
dst	Satuan Kerja dst						
	Diploma IV, S1-S3						(100%)
	Diploma I, II, III						(100%)
	SLTA dan kurang						(100%)
	Sub-jumlah						(100%)
	Irjen/Setjen/Deputi						
	Diploma IV, S1-S3						(100%)
	Diploma I, II, III						(100%)
	SLTA dan kurang						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Tabel I.A.2.8. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerianmenurut Wilayah Kerja /Provinsi(Kalau ada) dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Provinsi	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Nanggroe Aceh Darussalam						(100%)
2.	Sumatera Utara						(100%)
3.	Sumatera Barat						(100%)
4.	Sumatera Selatan						(100%)
5.	Bangka Belitung						(100%)
6.	Riau						(100%)
7.	Kepulauan Riau						(100%)
8.	Jambi						(100%)
9.	Bengkulu						(100%)
10.	Lampung						(100%)
11.	DKI Jakarta						(100%)
12.	Jawa Barat						(100%)
13.	Banten						(100%)
14.	Jawa Tengah						(100%)
15.	Jawa Timur						(100%)
16.	D.I Yogyakarta						(100%)
17.	Kalimantan Barat						(100%)
18.	Kalimantan Tengah						(100%)
19.	Kalimantan Timur						(100%)
20.	Kalimantan Selatan						(100%)
21.	Sulawesi Utara						(100%)
22.	Gorontalo						(100%)
23.	Sulawesi Tengah						(100%)
24.	Sulawesi Selatan						(100%)
25.	Sulawesi Barat						(100%)
26.	Sulawesi Tenggara						(100%)
27.	Bali						(100%)
28.	Nusa Tenggara Barat						(100%)
29.	Nusa Tenggara Timur						(100%)
30.	Maluku						(100%)
31.	Maluku Utara						(100%)
32.	Papua						(100%)
33.	Papua Barat						(100%)
34.	Kementerian						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Tabel I.B. Contoh *Dummy Tables* tentang Data Terpilah Pelaku Pembangunan Kementerian (Khusus-Optional)

Tabel I.B.1. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerian di Satuan Kerja Setingkat Eselon 1 menurut Tugas Penyusunan NSPK dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Jenis NSPK	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Jenis/komponen 1						(100%)
2.	Jenis /komponen 2						(100%)
3.	Jenis/ komponen 3						(100%)
4.	Jenis/komponen 4						(100%)
dst	Jenis/komponen dst						(100%)
Jumlah							(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel I.B.2. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerian menurut Tugas Pemantauan Kegiatan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Kegiatan 1						(100%)
2.	Kegiatan 2						(100%)
3.	Kegiatan 3						(100%)
4.	Kegiatan 4						(100%)
dst	Kegiatan dst						(100%)
Jumlah							(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel I.B.3. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerianmenurut Tugas Evaluasi Kegiatan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Kegiatan 1						(100%)
2.	Kegiatan 2						(100%)
3.	Kegiatan 3						(100%)
4.	Kegiatan 4						(100%)
dst	Kegiatan dst						(100%)
Jumlah							(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Tabel I.B.4. Jumlah dan Persentase SDM di SE1 Kementerianmenurut
Tugas Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Tugas Penelitian	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Penelitian 1						(100%)
2.	Penelitian 2						(100%)
3.	Penelitian 3						(100%)
4.	Penelitian 4						(100%)
dst	Penelitian dst						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Lampiran 2...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 45 -

Lampiran 2.

Tabel II.A. Contoh *Dummy Tables* tentang Data Terpilah SDM sebagai Pemanfaat Hasil Pembangunan Kementerian

Tabel II.A.1. Jumlah dan Persentase SDM Kementerian Penerima Tugas Belajar S1/S2/S3 di Dalam Negeri, menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I (SEI), dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon I	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja B						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja C						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja D						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub-jumlah						100%
dst	Satuan Kerja dst						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub-jumlah						100%
	Kementerian						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Jumlah						100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 46 -

Tabel II.A.2. Jumlah dan Persentase SDM Kementerian Penerima Tugas Belajar S1/S2/S3 di Luar Negeri, menurut, SE I dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon I	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub-Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja B						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub-Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja C						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub-Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja D						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub-jumlah						100%
dst	Satuan Kerja dst						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Sub-jumlah						100%
	Kementerian						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1/D4						100%
	Jumlah						100%

Sumber: Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 47 -

Tabel II.A.3. Jumlah dan Persentase SDM KementerianPeserta
Berbagai Jenis Diklat Teknis menurut SEI dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon I	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja B						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja C						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja D						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub-jumlah						100%
dst	Satuan Kerja dst						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub-jumlah						100%
	Kementerian						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Jumlah						100%

Sumber: Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 48 -

Tabel II.A.4. Jumlah dan Persentase SDM Kementerian..... Peserta
Berbagai Jenis Diklat Administrasi menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I
dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon I	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja B						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja C						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja D						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub-jumlah						100%
dst	Satuan Kerja dst						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub-jumlah						100%
	Kementerian						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Jumlah						100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

Tabel II.A.5. Jumlah dan Persentase SDM Kementerian Peserta
Berbagai Jenis Diklat Penjenjangan Tk 1/2/3/4 menurut SE I dan
Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon I	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Penjenjangan Tk 4						100%
	Penjenjangan Tk 3						100%
	Penjenjangan Tk 2						100%
	Penjenjangan Tk 1						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja B						
	Penjenjangan Tk 4						100%
	Penjenjangan Tk 3						100%
	Penjenjangan Tk 2						100%
	Penjenjangan Tk 1						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja C						
	Penjenjangan Tk 4						100%
	Penjenjangan Tk 3						100%
	Penjenjangan Tk 2						100%
	Penjenjangan Tk 1						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja D						
	Penjenjangan Tk 4						100%
	Penjenjangan Tk 3						100%
	Penjenjangan Tk 2						100%
	Penjenjangan Tk 1						100%
	Sub-jumlah						100%
dst	Satuan Kerja dst						
	Penjenjangan Tk 4						100%
	Penjenjangan Tk 3						100%
	Penjenjangan Tk 2						100%
	Penjenjangan Tk 1						100%
	Sub-jumlah						100%
	Kementerian.....						
	Penjenjangan Tk 4						100%
	Penjenjangan Tk 3						100%
	Penjenjangan Tk 2						100%
	Penjenjangan Tk 1						100%
	Jumlah						100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Tabel II.A.6. Jumlah dan Persentase SDM Kementerian Peserta
Berbagai Rapat Koordinasi menurut SE I dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon I	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Kegiatan Koordinasi 1						100%
	Kegiatan Koordinasi 2						100%
	Kegiatan Koordinasi 3						100%
	Kegiatan Koordinasi 4						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja B						
	Kegiatan Koordinasi 1						100%
	Kegiatan Koordinasi 2						100%
	Kegiatan Koordinasi 3						100%
	Kegiatan Koordinasi 4						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja C						
	Kegiatan Koordinasi 1						100%
	Kegiatan Koordinasi 2						100%
	Kegiatan Koordinasi 3						100%
	Kegiatan Koordinasi 4						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja D						
	Kegiatan Koordinasi 1						100%
	Kegiatan Koordinasi 2						100%
	Kegiatan Koordinasi 3						100%
	Kegiatan Koordinasi 4						100%
	Sub-jumlah						100%
dst	Satuan Kerja dst						
	Kegiatan Koordinasi 1						100%
	Kegiatan Koordinasi 2						100%
	Kegiatan Koordinasi 3						100%
	Kegiatan Koordinasi 4						100%
	Sub-jumlah						100%
	Kementerian						
	Kegiatan Koordinasi 1						100%
	Kegiatan Koordinasi 2						100%
	Kegiatan Koordinasi 3						100%
	Kegiatan Koordinasi 4						100%
	Jumlah						100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 51 -

Tabel II.A.7. Jumlah dan Persentase SDM Kementerian Peserta Berbagai Kegiatan Sosialisasi menurut SEI dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon I	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja A						
	Kegiatan Sosialisasi 1						100%
	Kegiatan Sosialisasi 2						100%
	Kegiatan Sosialisasi 3						100%
	Kegiatan Sosialisasi 4						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja B						
	Kegiatan Sosialisasi 1						100%
	Kegiatan Sosialisasi 2						100%
	Kegiatan Sosialisasi 3						100%
	Kegiatan Sosialisasi 4						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja C						
	Kegiatan Sosialisasi 1						100%
	Kegiatan Sosialisasi 2						100%
	Kegiatan Sosialisasi 3						100%
	Kegiatan Sosialisasi 4						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja D						
	Kegiatan Sosialisasi 1						100%
	Kegiatan Sosialisasi 2						100%
	Kegiatan Sosialisasi 3						100%
	Kegiatan Sosialisasi 4						100%
	Sub-jumlah						100%
dst	Satuan Kerja dst						
	Kegiatan Sosialisasi 1						100%
	Kegiatan Sosialisasi 2						100%
	Kegiatan Sosialisasi 3						100%
	Kegiatan Sosialisasi 4						100%
	Sub-jumlah						100%
	Kementerian						
	Kegiatan Sosialisasi 1						100%
	Kegiatan Sosialisasi 2						100%
	Kegiatan Sosialisasi 3						100%
	Kegiatan Sosialisasi 4						100%
	Jumlah						100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Tabel II.B. Contoh *Dummy Tables* tentang Data Terpilah Masyarakat sebagai Pemanfaat Hasil Kementerian

Tabel II.B.1. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Peserta Berbagai Kegiatan Sosialisasi Umum dari Kementerian menurut Jenis Kelamin, Tahun....

No	Kegiatan Sosialisasi	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Sosialisasi 1						100%
2	Sosialisasi 2						100%
3	Sosialisasi 3						100%
4	Sosialisasi 4						100%
dst	Sosialisasi dst						100%
Jumlah							100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel II.B.2. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Peserta Berbagai Jenis Diklat Tenis dari kementerian menurut Jenis Kelamin, Tahun....

No	Jenis Diklat	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Diklat 1						100%
2	Diklat 2						100%
3	Diklat 3						100%
4	Diklat 4						100%
dst	Diklat dst						100%
Jumlah							100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Tabel II.B.3. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Peserta Berbagai Kegiatan Penyuluhan Teknis oleh Kementerian menurut Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Jenis Penyuluhan Teknis	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Penyuluhan Teknis 1						100%
2	Penyuluhan Teknis 2						100%
3	Penyuluhan Teknis 3						100%
4	Penyuluhan Teknis 4						100%
dst	Penyuluhan Teknis dst						100%
Jumlah							100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel II.B.4. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Penerima Program Bantuan dari Kementerian menurut Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Jenis Bantuan	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Bantuan 1						100%
2	Bantuan 2						100%
3	Bantuan 3						100%
4	Bantuan 4						100%
5	Bantuan 5						100%
dst	Bantuan dst						100%
Jumlah							100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel II.B.5. Jumlah dan Persentase Anggota Masyarakat Penerima Pelayanan dari Kementerianmenurut Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pelayanan 1						100%
2	Pelayanan 2						100%
3	Pelayanan 3						100%
4	Pelayanan 4						100%
5	Pelayanan 5						100%
dst	Pelayanan dst						100%
Jumlah							100%

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Tabel II.B.6. Jumlah dan Persentase Calon Mahasiswa yang Mendaftar ke
Akademi/Sekolah Tinggi Kedinasan (Kalau ada) menurut
Jenis Kelamin dan Provinsi Asal, Tahun

No.	Provinsi/Kementerian	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Nanggroe Aceh Darussalam						(100%)
2.	Sumatera Utara						(100%)
3.	Sumatera Barat						(100%)
4.	Sumatera Selatan						(100%)
5.	Bangka Belitung						(100%)
6.	Riau						(100%)
7.	Kepulauan Riau						(100%)
8.	Jambi						(100%)
9.	Bengkulu						(100%)
10.	Lampung						(100%)
11.	DKI Jakarta						(100%)
12.	Jawa Barat						(100%)
13.	Banten						(100%)
14.	Jawa Tengah						(100%)
15.	Jawa Timur						(100%)
16.	D.I Yogyakarta						(100%)
17.	Kalimantan Barat						(100%)
18.	Kalimantan Tengah						(100%)
19.	Kalimantan Timur						(100%)
20.	Kalimantan Selatan						(100%)
21.	Sulawesi Utara						(100%)
22.	Gorontalo						(100%)
23.	Sulawesi Tengah						(100%)
24.	Sulawesi Selatan						(100%)
25.	Sulawesi Barat						(100%)
26.	Sulawesi Tenggara						(100%)
27.	Bali						(100%)
28.	Nusa Tenggara Barat						(100%)
29.	Nusa Tenggara Timur						(100%)
30.	Maluku						(100%)
31.	Maluku Utara						(100%)
32.	Papua						(100%)
33.	Papua Barat						(100%)
34.	Kalimantan Utara						(100%)
35.	Kementerian						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Tabel II.B.7. Jumlah dan Persentase Calon Mahasiswa yang Diterima ke Akademi/Sekolah Tinggi Kedinasan (Kalau ada) menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Asal, Tahun

No.	Provinsi/ Kementerian	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Nanggroe Aceh Darussalam						(100%)
2.	Sumatera Utara						(100%)
3.	Sumatera Barat						(100%)
4.	Sumatera Selatan						(100%)
5.	Bangka Belitung						(100%)
6.	Riau						(100%)
7.	Kepulauan Riau						(100%)
8.	Jambi						(100%)
9.	Bengkulu						(100%)
10.	Lampung						(100%)
11.	DKI Jakarta						(100%)
12.	Jawa Barat						(100%)
13.	Banten						(100%)
14.	Jawa Tengah						(100%)
15.	Jawa Timur						(100%)
16.	D.I Yogyakarta						(100%)
17.	Kalimantan Barat						(100%)
18.	Kalimantan Tengah						(100%)
19.	Kalimantan Timur						(100%)
20.	Kalimantan Selatan						(100%)
21.	Sulawesi Utara						(100%)
22.	Gorontalo						(100%)
23.	Sulawesi Tengah						(100%)
24.	Sulawesi Selatan						(100%)
25.	Sulawesi Barat						(100%)
26.	Sulawesi Tenggara						(100%)
27.	Bali						(100%)
28.	Nusa Tenggara Barat						(100%)
29.	Nusa Tenggara Timur						(100%)
30.	Maluku						(100%)
31.	Maluku Utara						(100%)
32.	Papua						(100%)
33.	Papua Barat						(100%)
34.	Kalimantan Utara						(100%)
35.	Kementerian....						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

Tabel II.B.8. Jumlah dan Persentase Lulusan Akademi/Sekolah Tinggi Kedinasan (Kalau ada) menurut Jenis Kelamin dan Penempatan Kerja, Tahun

No.	Provinsi/Tempat Penempatan	Jumlah			Komposisi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Nanggroe Aceh Darussalam						(100%)
2.	Sumatera Utara						(100%)
3.	Sumatera Barat						(100%)
4.	Sumatera Selatan						(100%)
5.	Bangka Belitung						(100%)
6.	Riau						(100%)
7.	Kepulauan Riau						(100%)
8.	Jambi						(100%)
9.	Bengkulu						(100%)
10.	Lampung						(100%)
11.	DKI Jakarta						(100%)
12.	Jawa Barat						(100%)
13.	Banten						(100%)
14.	Jawa Tengah						(100%)
15.	Jawa Timur						(100%)
16.	D.I Yogyakarta						(100%)
17.	Kalimantan Barat						(100%)
18.	Kalimantan Tengah						(100%)
19.	Kalimantan Timur						(100%)
20.	Kalimantan Selatan						(100%)
21.	Sulawesi Utara						(100%)
22.	Gorontalo						(100%)
23.	Sulawesi Tengah						(100%)
24.	Sulawesi Selatan						(100%)
25.	Sulawesi Barat						(100%)
26.	Sulawesi Tenggara						(100%)
27.	Bali						(100%)
28.	Nusa Tenggara Barat						(100%)
29.	Nusa Tenggara Timur						(100%)
30.	Maluku						(100%)
31.	Maluku Utara						(100%)
32.	Papua						(100%)
33.	Papua Barat						(100%)
34.	Kalimantan Utara						(100%)
35.	Kementerian.....						(100%)
	Jumlah						(100%)

Sumber: Biro Kepegawaian,Kementerian....., Tahun.....

Lampiran 3...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 3.

Tabel III.A. Contoh *Dummy Tables* tentang Data Terpilah sebagai Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

TABEL III.A.1. Daftar Peserta Pelatihan SDM Industri *Garmen* Berbasis *three in one* menurut Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan terakhir Tahun

NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN		UMUR (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR
		L	P		
JUMLAH					

Sumber:,,
(Nama Unit Kerja) (Instansi) (Tahun)

Tabel III.A.2. Daftar Peserta Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi menurut Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan terakhir Tahun

NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN		UMUR (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR
		L	P		
JUMLAH					

Sumber:,,
(Nama Unit Kerja) (Instansi) (Tahun)

Tabel III.A.3. Daftar Peserta Pelatihan Kesehatan Kerja *Higiene* Industri Prakompetensi menurut Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan terakhir Tahun

NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	UMUR (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR
JUMLAH				

Sumber:,,
(Nama Unit Kerja) (Instansi) (Tahun)

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

Tabel III.A.4. Daftar Nama Penemu Hasil Produksi yang Mempunyai Hak Paten menurut Jenis Kelamin dan Hasil Produksi Tahun

NO	NAMA PENEMU	JENIS KELAMIN		TEMPAT DAN TGL LAHIR	HASIL PRODUKSI
JUMLAH					

Sumber:,,
(Nama Unit Kerja) (Instansi) (Tahun)

Tabel III.A.5. Jumlah Tenaga Kerja menurut Perusahaan yang telah Memiliki Izin Usaha menurut Jenis Kelamin, Golongan Usaha, dan Warga Negara Tahun

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK/ PENANGGUNGJAWAB	JENIS KELAMIN		GOLONGAN USAHA			JML TENAGA KERJA											
			L	P	PERMODALAN (*)	BADAN HUKUM (**)	INDONESIA			ASING									
							M	K	M	L	P	L+P	L	P	L+P				
JUMLAH																			

Sumber:.....,.....,.....
(Nama Unit Kerja) (Instansi) (Tahun)

Keterangan:

- (*) Industri Mikro memiliki permodalan antara 1 juta - 5 juta
- (*) Industri Kecil memiliki permodalan antara 5 juta - 25 juta
- (*) Industri Menengah memiliki permodalan antara 25 - 50 juta
- (**) Badan Hukum : Perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, atau BUMN

Tabel...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Tabel III.A.8. Daftar Peserta Pelatihan Manajemen Prosedur Ekspor
menurut Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan terakhir, dan Jabatan
Tahun

NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN		UMUR (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
JUMLAH						

Sumber:,,
(Nama Unit Kerja) (Instansi) (Tahun)

Tabel III.A.9. Daftar Peserta Pelatihan Manajemen Prosedur Impor
menurut Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan Terakhir, dan Jabatan
Tahun

NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN		UMUR (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
JUMLAH						

Sumber:,,
(Nama Unit Kerja) (Instansi) (Tahun)

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001